

228

MENCERMATI KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI KAPOLDA JAWA TENGAH

(Mayjen Pol. Drs. Nurfaizi)

Beberapa waktu yang lalu, staf Redaksi telah mengadakan diskusi singkat dengan Kapolda Jateng, Mayjen Pol. Drs. Nurfaizi.

Diskusi tidak dapat berlangsung lama, karena tugas Kapolda yang padat, yang pada waktu itu sudah ada Bapak Jend. Pol. (P)

Drs. Kunarto, MBA. untuk memberi kuliah Program MM.

Diskusi dapat dituangkan staf redaksi Majalah Bhayangkara sebagai berikut:

akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat, sebab bentuk-bentuk kejahatan yang dulu masih bersifat tradisional sekarang sudah semakin meningkat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Bertitik tolak dari situasi tersebut, Polri sebagai abdi masyarakat yang bertugas sebagai pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat harus membenahi diri agar mampu mengatasi segala bentuk kejahatan yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut para petisi Polri perlu membuat kebijaksanaan/strategi tertentu yang dapat dijabarkan/dilakukan seluruh anggota yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Tulisan ini dibuat dengan maksud agar para anggota Polri mengetahui bagaimana kebijaksanaan/strategi Kapolda Jawa Tengah dalam menghadapi era globalisasi yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang.

Diharapkan kebijaksanaan dan strategi ini dapat dijabarkan dan dimanfaatkan semua anggota Polri baik yang bertugas di staf terutama yang bertugas di bidang operasional, sehingga keberadaan Polri dapat

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang sangat pesat, terutama di awal abad XX sekarang ini, telah menimbulkan perubahan-perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan, jika tidak individu yang tidak dapat mengikutinya akan tertinggal oleh kemajuan zaman.

Polri sebagai penegak hukum dan juga sebagai penanggung jawab utama dalam penegakan kamtibmas

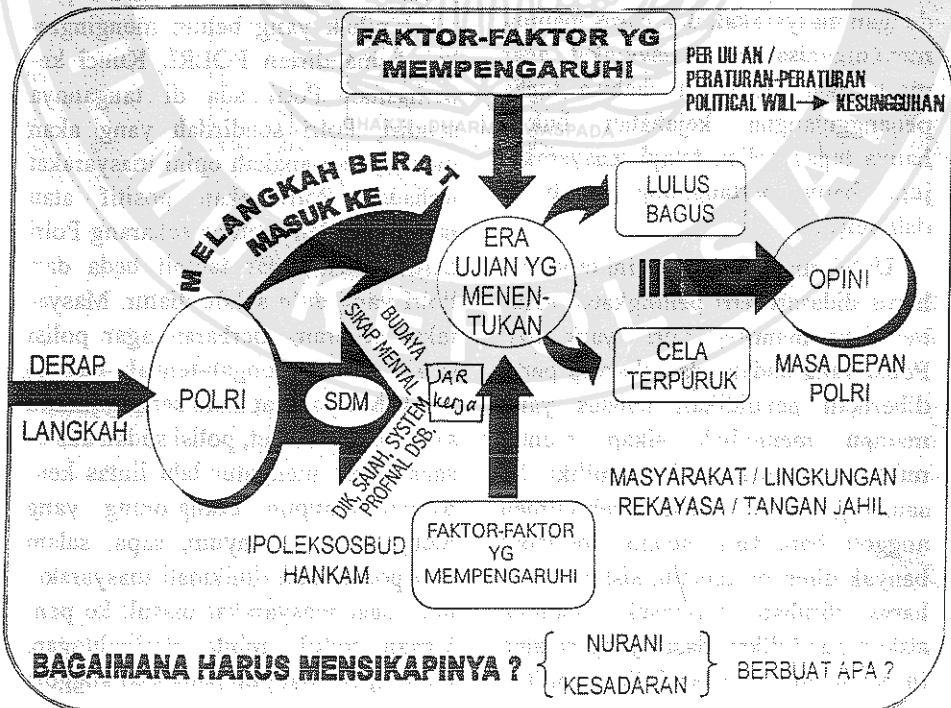
benar-benar dinikmati oleh masyarakat dengan terciptanya rasa aman baik secara individu maupun kelompok.

3. Era Ujian yang Menentukan

Era reformasi yang kita jalani saat ini menuntut adanya perubahan di segala bidang. Tirani yang selama ini terjadi tiba-tiba terbuka secara cepat dan telah meningkatkan rasa keberanian dalam diri masyarakat untuk bertindak. Kita menyadari bahwa di samping dampak positif yang timbul, juga banyak faktor-faktor negatif yang terjadi di era reformasi ini. Sebagian anggota masyarakat menafsirkan bahwa era reformasi adalah era kebebasan yang berarti mereka bisa bertindak semaunya. Karena itu,

Polri sebagai alat negara penegak hukum harus benar-benar mengerti tentang reformasi dan apa keinginan dari kalangan kaum reformis tersebut.

Fenomena sosial yang sangat kompleks saat ini di tengah masyarakat merupakan suatu ujian yang berat bagi Polri. Kebijakan baru perlu dibuat untuk mengawali langkah kerja Polri yang selama ini selalu dituntun oleh pihak yang merasa lebih tinggi/lebih menguasai Polri. Kompleksitas masyarakat Indonesia yang berada di beribu-ribu pulau dan terdiri dari bermacam-macam suku, agama, adat, dan bahasa merupakan tantangan yang harus dihadapi Polri, agar keanekaan tersebut dapat menjadi satu dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika.



Kita harus menyadari betul bahwa tugas yang diemban Polri saat ini bukanlah tugas yang mudah. Profesi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat menuntut agar polisi mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat. Harapan masyarakat ini tentunya bisa terlihat dari sikap maupun tingkah laku Polisi di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Untuk tercapainya tuntutan tugas kemasyarakatan yang diemban Polri tentunya harus diawali dengan pembenahan dalam tubuh Polri sendiri. Sekarang ini, Polisi harus mempunyai wajah baru yang mampu mengubah perilaku dari sifat militer yang serba kaku menjadi sifat demokratis yang luwes. Polisi harus mampu membina hubungan baik dengan masyarakat, dan harus mampu mengorganisasikan masyarakat agar masyarakat menyadari bahwa tugas penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas polisi, tetapi masyarakat juga harus bertanggung jawab di dalamnya.

Untuk mencapai tugas ini terutama harus didasari dari peningkatan sumber daya manusia Polri yang ada. Polisi yang sudah ada sekarang perlu diberikan pendidikan khusus yang mampu mengubah sikap mental militer yang selama ini dimiliki. Di samping itu, sistem rekrutmen anggota baru yang selama ini lebih banyak diterima melalui sistem KKN harus dirubah, termasuk merubah sistem pendidikan dasar yang selama ini menganut pola pendidikan militer.

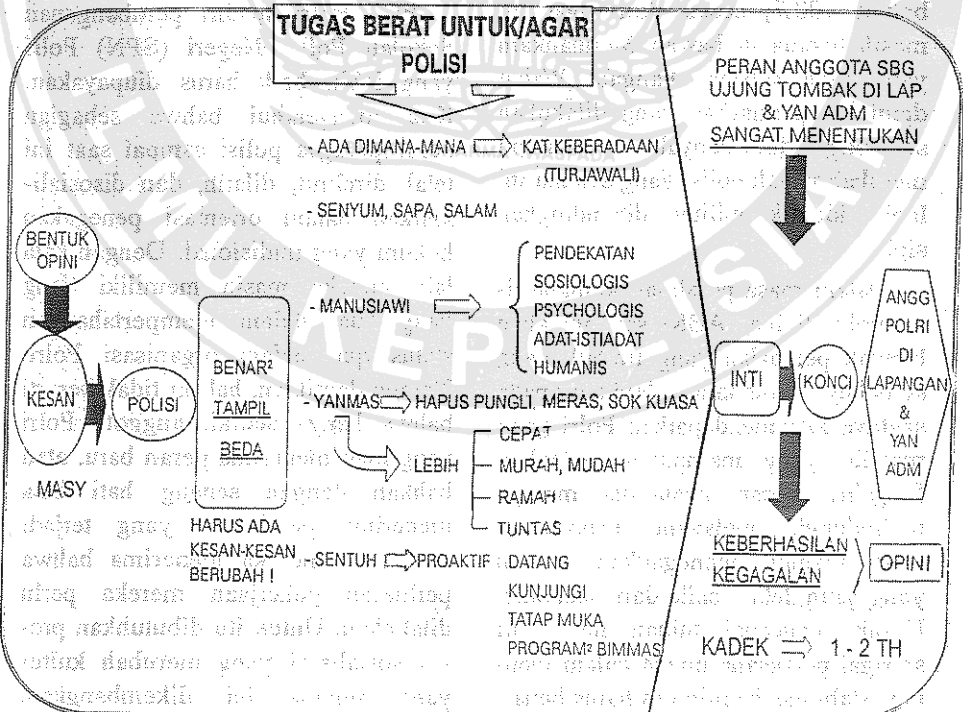
Pola pendidikan seperti ini sudah sangat jelas tidak sesuai untuk polisi sebagai mitra masyarakat, sebab pendidikan militer lebih mengarah kepada bagaimana menghancurkan musuh, yang berbeda dari tugas kepolisian.

Keberhasilan Polri untuk membentuk jati diri yang diinginkan masyarakat saat ini akan menentukan terhadap masa depan Polri. Jika polisi bisa menjawab ujian yang dihadapi sekarang akan menciptakan opini yang positif bagi masa depan Polri. Jika tidak, aib/cela yang selama ini ditujukan bagi Polri akan semakin dalam, yang menimbulkan semakin memuruknya citra Polri di mata masyarakat. Polisi harus tetap waspada, terutama untuk mengantisipasi pihak-pihak yang belum menginginkan kemandirian POLRI. Kunci keberhasilan Polri ada di tangannya sendiri, Polri sendirilah yang akan menentukan apakah opini masyarakat terhadap Polri akan positif atau negatif. Sudah saatnya sekarang Polri harus benar-benar tampil beda dari Polri yang dulu selalu diatur. Masyarakat sekarang berharap agar polisi selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat akan senang jika di saat jalanan macet, polisi sudah ada di sana untuk mengatur lalu lintas kendaraan maupun orang-orang yang menyeberang. Senyum, sapa, salam dari polisi akan dinikmati masyarakat pada saat masyarakat masuk ke penjagaan untuk minta perlindungan, bimbingan, ataupun pada saat anggota

masyarakat melakukan pelanggaran. Masyarakat akan merasa aman jika melihat polisi melakukan patroli di lingkungannya dan merasa aman ke mana pun akan melangkah.

Bagi pelaku kriminal polisi harus mampu memberikan pendekatan sosiologis maupun psikologis, karena polisi bukan membenci orang yang melakukan kejahatan tetapi benci terhadap kejahatan yang dilakukan. Tindakan kekerasan yang selama ini sering dilakukan bagi pelaku tindak kriminal harus dihilangkan. Polisi harus mampu menumbuhkan sifat humanis bagi anggota masyarakat.

Tugas Polisi sebagai pelayan masyarakat, kini harus dinyatakan. Hal ini akan terwujud jika praktik pungli, pemerasan, sok berkuasa tidak akan dilakukan oleh polisi. Pelayanan yang cepat, murah, mudah, ramah, dan tuntas harus diwujudkan bagi masyarakat. Program Bimmas harus lebih digalakkan. Babinkamtibmas yang merupakan ujung tombak Polri harus lebih rajin untuk berkunjung/bertatap muka dengan anggota masyarakat. Intinya persepsi negatif atau positif dari anggota masyarakat terhadap polisi akan terlihat dari bagaimana anggota Polri yang bertugas di lapangan maupun



yang memberikan pelayanan administrasi bagi masyarakat dapat melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya, jika pelaksanaannya baik persepsi masyarakat akan positif. Sebaliknya jika tidak, persepsi yang kurang baik masyarakat selama ini terhadap Polri akan bertambah.

B. MENUJU POLRI MANDIRI

Sejak 1 April 1999 Polri secara resmi berpisah dari ABRI. Kesempatan ini merupakan langkah awal bagi Polri untuk lebih membenahi diri, sebab selama ini Polri bagaikan anak kecil yang harus dituntun untuk bisa melangkah kakinya. Pemisahan yang dilakukan sekarang memang belum 100%, sebab Polri saat ini masih berada di bawah Menhankam yang juga sebagai Pangab. Walau demikian pemisahan yang dilakukan sekarang sedikit banyak telah mampu merubah wajah polisi yang selama ini lebih identik militer dibandingkan sipil.

Dalam masa peralihan kemandirian Polri di luar ABRI saat ini akan banyak persoalan yang timbul, yang semuanya harus kita hadapi agar pada saatnya kita mendapatkan Polri yang mandiri yang mampu menjalankan fungsinya secara nyata dan mampu melindungi, melayani masyarakat serta mampu menegakkan hukum yang jauh lebih baik dari sekarang. Untuk mencapai tujuan ini, Polri sebagai pelaksana utama dalam menjaga stabilitas kamtibmas harus benar-

benar mampu memegang komando pengendalian dalam segala bentuk gangguan kamtibmas.

Sebagai langkah awal, saat ini Polri harus mampu menarik simpati masyarakat. Kepolisian yang berbasis masyarakat harus benar-benar diterapkan, agar masyarakat siap dan merasa bertanggung jawab untuk mengatasi segala bentuk gangguan kamtibmas. Bagi TNI yang selama ini membawahi Polri harus benar-benar menyadari bahwa dalam mengatasi gangguan kamtibmas Polri adalah penanggung jawab komando pengendalian, karena itu TNI harus menyerahkannya kepada Polri meskipun penyerahan ini dilakukan secara perlahan-lahan.

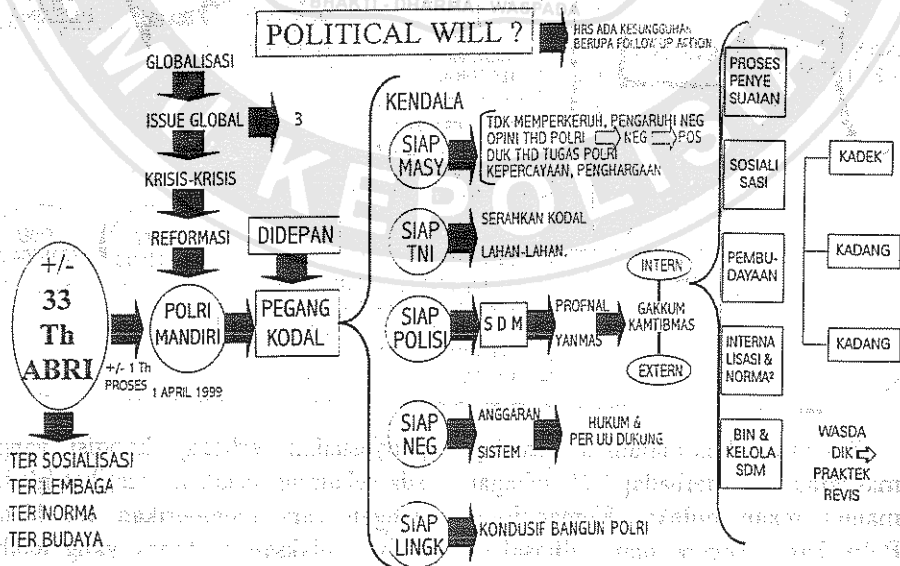
Bagi Polri sendiri pembangunan Sekolah Polisi Negeri (SPN) Polri yang lebih baik harus diupayakan. Kita mengetahui bahwa sebagian besar petugas polisi sampai saat ini telah direkrut, dilatih, dan disosialisasikan dalam orientasi penegakan hukum yang tradisional. Dengan kata lain mereka masih memiliki tiang yang kuat dalam mempertahankan status quo dalam organisasi Polri. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa hanya sedikit anggota Polri yang mau menerima peran baru, atau bahkan dengan senang hati bisa menerima perubahan yang terjadi sepanjang mereka menerima bahwa perluasan pekerjaan mereka perlu dilakukan. Untuk itu dibutuhkan proses sosialisasi yang merubah kultur yang selama ini dikembangkan.

Dengan adanya tuntutan perubahan ini polisi harus menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi anggota Polri yang tentunya berbeda dengan syarat-syarat menjadi anggota ABRI pada umumnya. Kualifikasi anggota Polri merupakan masalah penting dalam penerimaan awal, apalagi mengingat tuntutan pelayanan masyarakat yang akan semakin kompleks. Sesuai dengan sifat tugas kepolisian, maka diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi dan pembinaan profesi yang berbeda dengan prajurit ABRI.

Pemerintah sebagai penyelenggara semua kegiatan kenegaraan, harus siap untuk mendatang kemandirian ini. Kesiapan ini mencakup beberapa hal terutama anggaran dan sistem perundang-undangan yang ada. Dukungan anggaran ini sangat diperlu-

kan sebab semua perangkat organisasi polisi yang ada selama ini tentunya akan mengalami perubahan seperti penambahan personel dan juga pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung tugas kepolisian.

Kemandirian Polri yang terjadi saat ini tidak dengan sendirinya mampu meningkatkan kinerja dan citra Polri, masih diperlukan berbagai upaya untuk mendukung kemandirian ini. Proses penyesuaian diri bagi anggota Polri yang selama ini cenderung mengikuti doktrin militer harus mengubah diri dan secara perlahan-lahan melakukan sosialisasi terhadap pedoman hidup Polri (Tri Brata) dan pedoman kerja (Catur Prasetya). Pembudayaan semua personel yang ada dalam setiap fungsi baik fungsi operasional maupun pembinaan harus dioptimalkan.

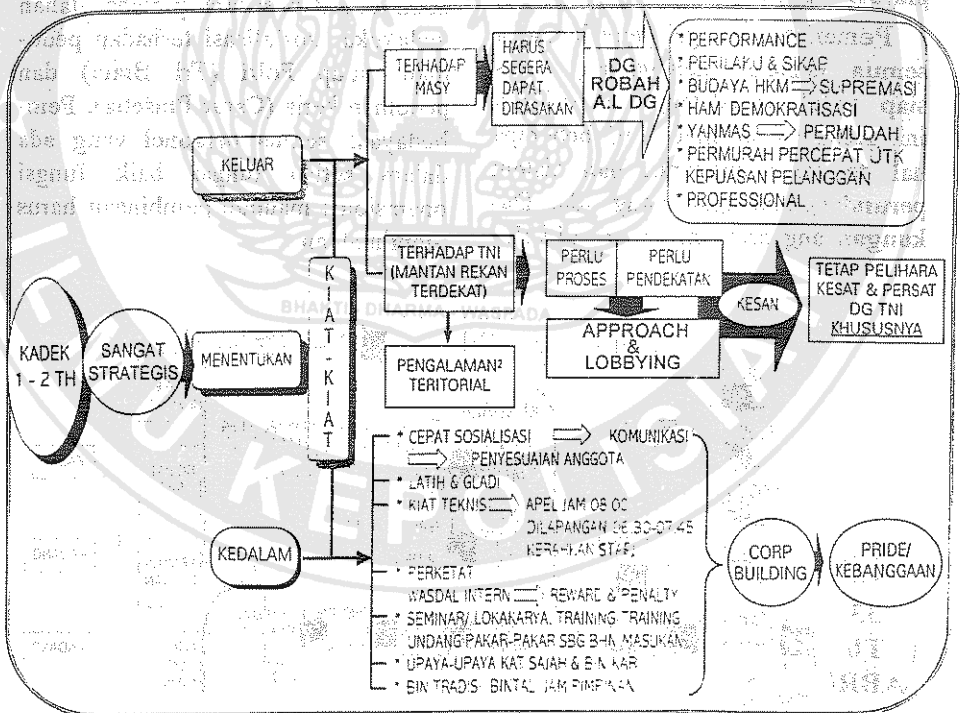


C. STRATEGI PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan perlu dicapai pola pelaksanaan berjangka, yang diawali dari pola pelaksanaan jangka pendek, sedang, dan jangka panjang. Pada tahap awal, program jangka pendek harus dilakukan secara cermat karena hal ini merupakan dasar pelaksanaan pada tahap-tahap berikutnya. Karena itu harus ditentukan kiat-kiat tertentu yang secara umum diarahkan terhadap dua sasaran baik ke luar maupun ke dalam.

masyarakat dengan adanya perubahan dalam diri Polri, baik performance, perilaku/sikap, budaya hukum, pendemokrasian Hak Azasi Manusia, pelayanan masyarakat, yang semuanya mengarah kepada keprofesionalan Polri. Bagi TNI sebagai teman dalam terdekot perlu dilakukan pendekatan. Pengalaman teritorial yang selama ini telah dilakukan perlu dipelajari sehingga hubungan dengan TNI tetap terpelihara.

Sasaran ke dalam dilakukan dengan cepat melakukan sosialisasi/



Sasaran ke luar diarahkan terhadap masyarakat dan terhadap TNI sebagai mantan rekan terdekot. Kemandirian Polri harus segera dapat dirasakan

penyesuaian terhadap kondisi yang ada sekarang. Adakan pelatihan/gladi dengan cara memberikan kiat-kiat/teknis pelaksanaan tugas yang lebih

efektif dan efisien, untuk lebih meningkatkan peran anggota. Dalam pelaksanaan tugas perlu peningkatan (memperketat) pengawasan dan pengendalian bagi setiap anggota.

Perluasan wawasan bagi anggota perlu diadakan seperti pelaksanaan seminar, loka karya, pelatihan-pelatihan yang dengan cara mengundang para pakar yang dapat memberikan bahan masukan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Di samping itu perlu diupayakan bagaimana cara peningkatan kesejahteraan anggota dan pembinaan karier anggota, karena hal ini merupakan aspek yang dapat meningkatkan motivasi kerja anggota. Kuantitas pelaksanaan pembinaan tradisi, pembinaan mental, jam pimpinan harus lebih ditingkatkan untuk membina sikap mental/moral setiap anggota.

D. LANGKAH-LANGKAH TEKNIK

1. Dalam melaksanakan tugas setiap anggota perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Mengamati setiap potensi konflik yang terjadi melalui pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya terutama menjelang pelaksanaan Pemilu. Pengalaman kampanye dari pemilu yang lalu perlu dipelajari sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan pengamanan pemilu sekarang. Di samping itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan sejarah konflik yang ada, setiap konflik yang terjadi harus segera diwaspadai dan segera disikapi dengan tindakan nyata di lapangan bukan teori-teori di belakang meja.
2. Mobilisasi potensi masyarakat yang ada, agar dapat dimanfaatkan untuk pemecahan masalah. Dalam menyelesaikan masalah jangan bertindak sendiri, libatkan semua potensi seperti muspida, tokoh masyarakat, Ketua-ketua OPP/Satgas OPP, Panitia pengawasan dan lain-lain yang bisa mendukung penyelesaian masalah.
3. Jangan ambil risiko terutama dalam menghadapi massa, segera mengerahkan pasukan, ataupun kekuatan jaga dan segera mengantisipasi perkembangan yang terjadi. Upayakan jangan sampai ada tenggang waktu karena hal ini akan memberikan peluang masuknya para provokator dan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Opini yang timbul di kalangan masyarakat harus segera dikuasai, segera luruskan berita terhadap isu yang berkembang atau ciptakan pernyataan sebagai counter terhadap isu yang akan terjadi. Tetap membina hubungan yang harmonis dan baik dengan muspida untuk memberikan persepsi positif bagi masyarakat bahwa semua aparat terkait bersatu.
4. Hilangkan budaya menunggu perintah, setiap anggota/kesatuan harus aktif dan bisa mengambil

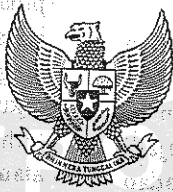
inisiatif untuk segera bergerak. Hilangkan keraguan karena jika terlambat berpikir akan terlambat dalam bertindak. Setiap kekuatan pasukan yang sedang bergerak harus bertindak tegas dan konsekwen namun tetap penuh perhitungan. Kembangkan sifat kepemimpinan yang proaktif di lapangan.

- 5. Tinggalkan budaya "power oriented" ganti dengan "public service" dengan meningkatkan pelayanan di semua bidang terutama pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Upayakan menarik simpati masyarakat, dengan cara merebut opini. Bagi pimpinan pasukan harus tetap membriefing/drill anggota sampai tingkat paling bawah secara kontiniu. Dalam mendukung pelaksanaan tugas upayakan peningkatan kesejahteraan anggota sesuai

dengan peran masing-masing. Bertindak sesuai dengan tuntutan bidang tugas masing-masing. Setiap anggota harus berupaya meningkatkan kemampuan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya agar mampu menciptakan kiat-kiat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

E. PENUTUP

Demikianlah tulisan ini dibuat sebagai pemahaman terhadap kebijaksanaan dan strategi Kapolda Jawa Tengah. Semoga apa yang ada dalam tulisan ini dapat memperluas wawasan setiap anggota Polri dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan Polri, demi terwujudnya Polri yang dicintai dan dibanggakan masyarakat. (A.S., N) □



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PALANGKA RAYA**

Mengucapkan

Diringahayu Dies Natalis Ke-53 PTIR